

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target dan 241 indikator yang direncanakan dapat dicapai selama 15 tahun sampai dengan tahun 2030 (Sumekar dan Haryadi, 2016). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tujuan pertama dari SDGs yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia adalah menghapus kemiskinan (BPS, 2016). Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengeyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga. Dalam menuntaskan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, pemerintah melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia membuat kriteria daerah tertinggal, yang mana nantinya lebih memfokuskan pembangunan kepada daerah tertinggal. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 – 2019, Presiden Joko Widodo telah menetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal tahun 2015 – 2019. Di provinsi Jawa Timur terdapat empat kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal, yaitu Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang.

Penetapan daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah (Perpres, 2015). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) dalam suatu daerah (Romadhoni dkk, 2018). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi netto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah (BPS, 2013). Berdasarkan data rangkuman BPS, nilai PDRB untuk empat kabupaten di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal termasuk kecil dibandingkan dengan nilai PDRB di kabupaten lainnya di Jawa Timur. Nilai PDRB di Kabupaten Bondowoso tahun 2015 sampai 2018 mengalami sedikit peningkatan masing-masing sebesar 14,486 ; 15,863 ; 17,157 dan 18,527 miliar rupiah. Kabupaten Situbondo memiliki nilai PDRB dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami sedikit peningkatan masing-masing sebesar 14,796 ; 16,281 ; 17,545 dan 18,930 miliar rupiah. Kabupaten Sampang memiliki nilai PDRB dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami sedikit peningkatan masing-masing sebesar 14,697 ; 16,245 ; 17,707 dan 19,229 miliar rupiah. Selanjutnya Kabupaten Bangkalan memiliki nilai PDRB tahun 2015 sampai 2018 sedikit lebih tinggi dibanding tiga kabupaten tertinggal lainnya, yaitu masing-masing sebesar 19,199 ; 20,134 ; 21,675 dan 23,887 miliar rupiah (BPS, 2018). Nilai PDRB dari keempat kabupaten tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Lamongan yang digolongkan bukan termasuk daerah tertinggal dari tahun 2015 sampai 2017 masing-masing sebesar 28,746 ; 31,707 dan 34,370 miliar rupiah.

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa tingkat kemiskinan dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat (LIPI, 2014). Di Indonesia, pengukuran kemiskinan salah satunya dilakukan oleh BPS. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan pendekatan ini, BPS merumuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan pada daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal di empat kabupaten di Jawa Timur memiliki nilai yang termasuk tinggi. Berdasarkan data rangkuman dari BPS, Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kemiskinan secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2018 sebesar 14,96% ; 15% ; 14,54% dan 14,39 %. Kabupaten Situbondo memiliki tingkat kemiskinan yang lebih kecil jika dibandingkan Kabupaten Bondowoso, yang ditunjukkan dengan nilai tingkat kemiskinan secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2018 sebesar 13,63%, 13,34%, 13,05% dan 11,82%. Selanjutnya, di Kabupaten Bangkalan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih besar jika dibandingkan dua kabupaten sebelumnya, secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2018 sebesar 22,57%, 21,41%, 21,32% dan 19,59%. Tingkat kemiskinan tertinggi diantara empat kabupaten yang merupakan kategori daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang memiliki tingkat kemiskinan secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2018 sebesar 25,69%, 24,11%, 23,56% dan 21,21%.

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Tony Irawan dan Sudarsana Arka (2015) adalah menganalisis pengaruh Pendidikan, PDRB dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali dengan metode regresi linier berganda dan diperoleh hasil bahwa Pendidikan, PDRB, dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Edi Dores (2014) meneliti pengaruh angka melek huruf dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode regresi linier berganda dan diperoleh hasil bahwa angka melek huruf berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Selanjutnya Arie Bhaswara (2018) meneliti pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dengan metode *Least Square Dummy Variable (LSDV)*, penggunaan *dummy* wilayah pada setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, dari penelitian didapatkan hasil bahwa PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Zulia Agustina (2015) meneliti pengaruh jumlah penduduk dan

konsumsi energi terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2012 menggunakan metode regresi linier berganda dan diperoleh hasil bahwa konsumsi energi dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Menurut Todaro (2004), kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, ketiadaan investasi fisik dan moneter yang menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita lebih kecil.

Model persamaan simultan merupakan suatu model dengan sejumlah persamaan membentuk suatu sistem persamaan yang menggambarkan ketergantungan diantara berbagai variabel dalam persamaan-persamaan tersebut (Sprout dan Weaver, 1993). Koutsoyiannis (1977) juga menyatakan, bahwa persamaan simultan mempunyai hubungan dua arah dalam fungsi yang menyatakan bahwa fungsi tidak dapat diperlakukan secara terpisah sebagai model persamaan tunggal sehingga perlu adanya suatu model yang mencakup masalah tersebut. *Two Stage Least Square* adalah metode statistik yang digunakan untuk menggantikan metode OLS yang tidak dapat digunakan untuk mengestimasi suatu persamaan dalam sistem persamaan simultan (Kusumawardhani, 2012). Kasus-kasus dalam Ekonometrika sering terjadi hubungan saling mempengaruhi antar variabel. Penelitian yang berhubungan dengan sistem persamaan simultan dilakukan oleh Ruxanda dan Muraru (2010) yang meneliti hubungan antara investasi asing dan pertumbuhan ekonomi di Rumania, yang menyatakan bahwa investasi asing dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan mempunyai dampak positif satu sama lain.

Mengacu pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan regresi linier berganda maupun sistem persamaan simultan bahwa menurut kenyataan PDRB dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan. Pada saat yang bersamaan, tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh PDRB, angka melek huruf dan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk memodelkan PDRB dan Tingkat Kemiskinan menggunakan

pendekatan sistem persamaan simultan berdasarkan metode *Two Stage Least Square* (2SLS) yang melibatkan *dummy variable*. Penggunaan *dummy variable* dilakukan untuk melihat perbedaan karakteristik dari empat Kabupaten di Jawa Timur yang dikriteriakan sebagai daerah tertinggal berdasarkan PDRB dan Tingkat Kemiskinan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah PDRB dipengaruhi oleh Tingkat Kemiskinan dan Kepadatan Penduduk, selain itu untuk mengidentifikasi apakah Tingkat Kemiskinan dipengaruhi oleh PDRB, Angka Melek Huruf dan Tingkat Pengangguran Terbuka, sehingga dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk tujuan berkelanjutan Indonesia di tahun 2030.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran umum indikator pembangunan Indonesia pada tahun 2002 – 2018 dilihat dari PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang?
2. Bagaimana membuat model persamaan simultan untuk indikator pembangunan Indonesia pada tahun 2002 – 2018 dilihat dari PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang?
3. Bagaimana analisis dan interpretasi untuk indikator pembangunan Indonesia pada tahun 2002 – 2018 dilihat dari PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran umum indikator pembangunan Indonesia pada tahun 2002 – 2018 dilihat dari PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang.
2. Mendapatkan model persamaan simultan untuk indikator pembangunan Indonesia pada tahun 2002 – 2018 dilihat dari PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang.
3. Melakukan analisis dan interpretasi indikator pembangunan Indonesia pada tahun 2002 – 2018 dilihat dari PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan mengenai indikator-indikator mengenai pembangunan berkelanjutan Indonesia dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat.

2. Bagi Pemerintah Indonesia

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dan rekomendasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia pada tahun 2030.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau informasi tambahan sehingga bisa menjadi wawasan untuk para masyarakat yang membaca.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah membahas masalah penyimpangan asumsi residual apabila terjadi heteroskedastisitas, tetapi tidak membahas penyimpangan asumsi residual apabila terjadi otokorelasi. Selain itu dalam penulisan skripsi ini tidak membahas kasus multikolinieritas.